



### **RENCANA KERJA**

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021

#### **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021. Renja merupakan penjabaran dari RPJMD KabupatenMurung Raya sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing, sebagai arah pencapaian tugas instansi dalam kurun waktu satu tahun ke depan dan diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 serta memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai, dan sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2021.

Renja merupakan dokumen tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai peraturan formal dan mengikat setiap kegiatan Dinas, artinya semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan Dinas senantiasa harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Renja.

Demikian Renja Tahun 2021 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Puruk Cahu, Maret 2021 la Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kasapasen Murung Raya,

650811 198603 2 014



#### **DAFTAR ISI**

		Halaman
KATA PI	ENGANTAR	i
DAFTAR	lsi	ii
BAB I.	PENDAHULUAN	3-4
	1.1 Latar Belakang	4
	1.2 Landasan Hukum	4-7
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN LALU	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun Lalu dan	
	Capaian Renstra Disdukcapil	10-16
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil	16-17
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil	18-19
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	21-22
	3.2 Tujuan dan Sasaran RenjaDisdukcapil	22-24
	3.3. Program dan Kegiatan	24-27
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL	28-39
DAD V	DENITTID	40



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.



Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

#### 1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya adalah :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Lembaran Negara Nomor 4180);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Penbangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4421) :
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
   2007;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedomann Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan
   Pemerintah Daerah yang menajdi kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran
   Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59);

- - 21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);
  - 22. Peraturan Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan tatalaksana Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya. (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61);
  - 23. Peraturan Daerah Kebupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028;
  - 24. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4);
  - 25. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;

#### 1.3 Maksud dan Tujuan.

#### 1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya selama beberapa bulan kedepan setelah terjadi koreksi dan evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan potensi yang tersedia (menetapkan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja).

#### 2. Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah:

- Menunjukan aktualisasi perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
- 2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.
- 3. Menunjang dan mendukung RENJA Kabupaten.
- 4. Menunjang dan mendukung program yang telah ditetapkan daerah.
- 5. Membangun kebersamaan untuk menciptakan Pemerintahan yang baik dan mampu berdaya saing dalam rangka optiomalisasi pelayanan publik.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DisdukcapilTahun Lalu dan Capaian Renstra Disdukcapil.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil.
- 2.4 Rewiew terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL

#### **BABV PENUTUP**



#### **BAB II**

#### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 terhadap capaian renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2019.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2021.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja sebagai pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018-2023 telah dapat diketahui.

Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana pada tabel berikut :

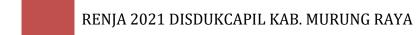
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2021 Kabupaten Murung Raya

				Urusan/Bidang	Indikator		arget	t	ealisasi arget erja hasil		get dan re	alisasi	kinerja pr an tahun la	ogram dan		arget ram/kegi	cap	erkiraan r aian target npai denga berjala	t RPJMD an tahun
	F	Kode		Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Ca Pr (Ren	inerja apaian ogram astra PD) aun 2023	prog ke keg d tah	gram dan luaran iatan s/d engan un 2019 nun n-3)	tah	get RKPD un 2020 hun n-2)	RKI 202	ealisasi PD tahun 0 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)	atan ta be (tah	n RKPD ahun rjalan uun n-1) 2021	ca prog kegi t be (tal	calisasi apaian ram dan atan s/d ahun rjalan aun n-1) 2021	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
		1		2	3		4		5		6		7	8=(7/6)		9	10=0	(5+7+9)*	11=(10/4)
2				Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	12			Bid. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	12	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhuan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah														
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Meningkatnya Kinerja Aparatur Pengelola Administrasi Keuangan dan	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	48	Bulan	60%



					Pengeloaan Barang														
2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dan Bimtek Bagi Aparatur Pegawai	60	Orang	24	Orang	12	Orang	12	Orang	100%	12	Orang	48	Orang	60%
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Umum dan Operasional Kantor	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	60%
2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	paket	-	paket	-	Paket	-	paket	#DIV/0!	-	paket	-	paket	0%
2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang dan Prasarana Perkantoran	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	48	Bulan	60%
2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Perizinan Operasional Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Gedung Kantor	60	Unit	24	Unit	12	Unit	12	Unit	100%	12	Unit	48	Unit	60%

2	12	02		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemenuhuan Kebutuhan Penunjang Bidang Pendaftaran Penduduk														
2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Pelaksanaan Pencapaian Target Pembuatan KTP Elektronik dan KIA di Kecamatan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	60%
2	12	02	2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Tata Cara Perencanaan dan Pelaporan dan Dokumen Blanko KTP-el,Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	60%
2	12	02	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pelaksanaan Rakor Administrasi dan Formulir serta Blanko/Formulir Pendaftaran Penduduk	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	60%
2	12	02	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur Pendaftaran Penduduk	50	Orang	20	Orang	10	Orang	10	Orang	100%	10	Orang	40	Orang	60%
2	12	03		Program Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhuan Kebutuhan Penunjang Bidang														



					Pencatatan Sipil														
2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Pelaksanaan Pencapaian Target Pembuatan Akta Pencatatan Sipil di Kecamatan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	60%
2	12	03	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pelaksanaan Rakor Administrasi Pencatatan Sipil	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	60%
2	12	03	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur Pencatatan Sipil	50	Orang	20	Orang	10	Orang	10	Orang	100%	10	Orang	40	Orang	60%
2	12	04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhuan Kebutuhan Penunjang Bidang Infoduk														
2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terpenuhinya Pelaksanaan Data Administrasi Kependudukan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	60%
2	12	04	2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya Pendataan Pembuatan Data Profil dan Agregat Kependudukan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	60%



2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pelaksanaan Rakor Administrasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	60%
2	12	04	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur Pengelola Infromasi Administrasi Kependudukan	50	Orang	20	Orang	10	Orang	10	Orang	100%	10	Orang	40	Orang	60%
2	12	05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhuan Kebutuhan Pembuatan Profil Kependudukan														
2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Terpenuhinya Penyusunan Data Profil dan Agregat Kependudukan	5	paket	2	paket	1	Paket	1	paket	100%	1	paket	4	paket	60%



dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2019 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildi tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa:

- 1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Presentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu
  - b. Cakupan pelayanan Akta perkawinan tepat waktu
  - c. Cakupan pelaporan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu
- Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
  - b. Presentase kepemilikan KTP el
  - c. Presentase penerbitan akta kematian
  - d. Presentase kerjasama pemanfataan data kependudukan
  - e. Prsentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
- 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
  - b. Presentase kepemilikan Akta Kelahiran
  - c. Presentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik

Faktor tidak tercapainya target dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang dalam pembuatan dokumen kependudukan berupa KIA dan Akta Kelahiran khusunya untuk usia lansia sementara untuk sarana prasarana adminduk ada beberapa yang masih asset pusat sehingga dinas tidak sdapat melaksanakan perbailkan . dengan tidak tercapainya target maka hak masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan KIA dan Akta Kelahiran belum dapat terpenuhi. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil menindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisai Administrasi kependudukan dan juga melaksanakan jemput bola untuk pembuatan Dokumen kependudukan hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam membuat dokumen kependudukan sehingga target kepemilikan dokumen kependudukan dapat meningkat.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.



Adapun indikator kinerja yang tertuang pada Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023, sebagai berikut:

#### IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)
Terpenuhinya Kepemilikan Identitas	1. Persentase Penduduk ber Kartu Tanda
Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagi	Penduduk (KTP)
Masyarakat	2. Persentase Penerbitan Kartu Identitas
	Anak (KIA)
	3. Persentase Penduduk ber Akta
	Kelahiran (0-18 Tahun)
	4. Indeks Kepuasan Masyarakat

sbb:

Berikut Tabel Capaian Kinerja Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Standar Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil

No	Indikator	SPM Standar	IKK		Target	Renstra P	erangkat	Daerah			Realisasi	Capaian		Proy	veksi
		Nasional		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)			85%	90%	100%	100%	100%	100%	80%	93%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)			0%	50%	75%	90%	100%	100%	0	0	0	40%	40%	40%
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun			38	60%	90%	95%	100%	100%	72%	72%	72%	96%	100%	100%
4	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### 2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo cukup baik karena dari ke lima indikator kinerja tersebut, telah memenuhi target yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.

### 2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

- a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki
- b. Sarana dan Prasarana perlu ditingkatkan
- c. Tingkat kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan dokumen kependudukan masih rendah
- d. Ketidaksamaan data antara yang ada di Kartu Keluarga ( KK ) dengan data pendukung lainnya
- e. Pindah datang penduduk tidak melapor sehingga terjadi data ganda
- f. Masih adanya penduduk yang meninggal tidak di laporkan ( tidak dibuatkan akta kematiannya)
- h. Jaringan internet sering troble (lemot)
- Kalau system di pusat troble berdampak pada system yang ada di Kabupaten /
   Kota.

## 2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah , terhadap capaian programnasional / internasional , seperti SPM dan MDGs ( Milenium development Goals )

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Murung Raya akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu " Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil "

#### 2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunanaan dokumen kependudukan;
- 2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan.



 Belum tersedianya gedung kantor yang representatif khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.

### 2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan Pencatatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasirekomendasi sebagai berikut :

- Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) online merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan Pencatatan secara modern sesuai dengan standart internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa ( PBB ) harus disukseskan pelaksanaannya.
- Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa agar diupayakan segera dibangun gedung arsip kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya yang representatif.
- 3. Dalam rangka mensukseskan program KTP elektronik di Kabupaten Murung Raya tahun 2021 diperlukan dukungan sarana dan prasarana, tambahan petugas yang memiliki kompetensi di bidang informasi tekhnologi (IT) serta kerjasama dengan semua pihak, khususnya aparat tingkat Kecamatan dan Aparat Desa / Kelurahan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD, dengan rencana program proritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi proritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Telaahan usulan program dam kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap proritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Usulan program Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program proritas yang tercantum dalam



Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disepakati untuk mengadakan kegiatan forum gabungan bersama dengan Bappedalitbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Dalduk dan KB, Dinas Perpustakaan dan Kerasipan dan Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh anggaran sebesar Rp. 6.299.268.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Semblan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengajukan anggaran sebesar Rp. 5.485.667.056 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) yang terurai dalam 5 Program, 17 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan, dan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 98%

#### BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MURUNG RAYA

#### 3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan.

Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJMN Tahun 2015-2019 adalah "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan". Dari Prioritas tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah "meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan". Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja Disdukcapil Tahun 2023 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui:



- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasai Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Organisasai Perangkat Daerah. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Organisasai Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tujuan organisasai perangkat daerah berupa pernyataan tentang halhal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan

R

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2. Terciptanya kualitas dan kuantitas layanan informasi data kependudukan skala Provinsi;
- Tersedianya layanan informasi data kependudukan di lingkungan Pemerintah kabupaten
   Murung Raya

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu, adalah sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal;
- Terpenuhinya informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Murung Raya;

Pada Tahun 2019 dilakukan review RENSTRA dan RENDA OPD bersama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya di mana dari hasil review terjadi perubahan dan penyempurnaan isian pada tabel-tabel rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah yang salah satunya adalah tujuan dan indikator tujuan serta sasaran dan indikator sasaran, sehingga tujuan dan indikator tujuan serta sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya menjadi:

Tujuan:

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
 Indikator tujuan : Persentase peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan Sipil

2. Meningkatnya kinerja OPD

Indikator tujuan: Nilai Evaluasi SAKIP

Sasaran:

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
 Indikator Sasaran : Persentase peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan Sipil

2. Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja

Indikator Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan

adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang akan diwujudkan pada Tahun 2021 sebanyak 5 Program, 17 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan sebagai berikut :

#### **PROGRAM:**

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pendaftaran Penduduk
- 3. Program Pencatatan Sipil
- 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

#### **KEGIATAN:**

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 7. Penataan Pendaftaran Penduduk
- 8. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- 9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- 10. Pelayanan Pencatatan Sipil
- 11. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- 12. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Pengumpul Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
- 14. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 15. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 16. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 17. Penyusunan Profil Kependudukan

#### **SUB KEGIATAN:**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 11. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 15. Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor
- 16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 19. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 20. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
- 21. Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan
- 22. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota Dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 23. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
- 24. Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
- 25. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
- 26. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /
  Kota Dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
- 27. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
- 28. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
- 29. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- 30. Penyusunan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 31. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /
  Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 32. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



- 33. Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pendayagunaan Data Kependudukan
- 34. Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain



#### **BAB IV**

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan misi menuju Kabupaten Murung Raya yang tepat agar program kebijakan dapat berjalan dengan baik, salah satu strategi yang tepat untuk digunakan dalam mencapai keberhasilan kebijakan adalah dengan sistem perencanaan yang komperhensif, realistis, akuntabel, dan transparan. Akan tetapi sistem perencanaan yang sudah baik tanpa dimplementasikan dengan cermat juga akan menjadi penghambat pelaksanaan program kegiatan. Untuk itu perencanaan yang baik perlu juga didukung dengan implementasi kebijakan selaras dengan perencanaan, karena sebuah kebijakan merupakan siklus yang saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya maka perencanaan yang sudah baik didukung dengan implementasi yang cermat dan tepat maka selanjutnya diperlukan monitoring dan evaluasi untuk menentukan indikator keberhasilan program kebijakan melalui monitoring dan evaluasi akan diketahui tingkat keberhasilan dan hambatan dalam program kebijakan.

Sebagaimana di ketahui bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk bagi setiap pelaksana kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan masyarakat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturutturut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani oleh Disdukcapil Kabupaten Murung Raya disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 dan prakiraan Maju Tahun 2022

					iaja Tallali 202	<del></del> -			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja	Rei	ncana Tahun 20	021 (tahun rencana)		Catatan	Prakiraan I	Maju Rencana Tahun 2022
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kebutuhan	Target capaian kinerja	Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Penting	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.485.667.056				
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.485.667.056				5.603.127.792
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Jenis Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.502.756.764				4.568.604.867
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Admininistrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.380.660.000				2.338.274.776
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Murung Raya	12 Bulan	2.292.500.000	APBD		12Bulan	2.229474.776
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi dan Pengelola Keuangan	Kab.Murung Raya	12 Bulan	88.160.000	APBD		12 Bulan	108.800.000
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian Daerah			3.360.000				19.512.658
2.12.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan	Kab.Murung			APBD		18 Stell	16.712.658



		Prasarana yang di	Raya		1 1	1		
		, ,	Kaya					
		sediakan						
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Jenis Pendidikan	Kab.Murung	12 Bulan	1.860.000	APBD	12 Bulan	1.400.000
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Pelatihan yang di	Raya					
		sediakan						
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Jenis Bimbingan	Kab.Murung	12 Bulan	1.860.000	APBD	12 Bulan	1.400.000
	Peraturan Perundang-Undangan	Teknis Implementasi	Raya					
		Peraturan Perundang-						
		undangan yang di						
		sediakan						
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Jenis			503.314.614			609.789.041
	Daerah	Administrasi Umum						
		Perangkat Daerah						
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Jenis Komponen	Kab.Murung	12 Bulan	2.963.000	APBD	12 Bulan	4.958.795
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instasli	Raya					
	Tanto.	Listrik/Penerangan						
		Bangunan Kantor yang di						
		sediakan						
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Jenis Peralatan	Kab.Murung	1 Paket	15.000.0000	APBD	12 Bulan	62.565.800
	Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor	Raya					
		yang di sediakan						
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Jenis Peralatan	Kab.Murung	12 Bulan	2.900.000	APBD	12 Bulan	14.817.500
	Tangga	Rumah Tangga yang di	Raya					
		sediakan	·					
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan	Kab.Murung	12 Bulan	151.247.151	APBD	12 Bulan	135.663.196
		Logistik yang di sediakan	Raya					
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Jenis Barang	Kab.Murung	12 Bulan	31.462.000	APBD	12 Bulan	40.356.750
	Penggandaan	Cetakan dan	Raya					
		Pengganandaan yang di						
		sediakan						
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Jenis Bahan	Kab.Murung	12 Bulan	15.750.000	APBD	12 Bulan	27.000.000
	Peraturan Perundang-Undangan	bahan Bacaan dan	Raya					
			· <b>J</b> ···		]			



		Peraturan Perundang-						
		undangan yang di						
		sediakan						
2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis	Kab.Murung			APBD	12 Bulan	10.598.300
	2 22.9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Bahan/Material yang di	Raya					
		sediakan						
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makanan	Kab.Murung	12 Bulan	34.600.000	APBD	12 Bulan	9.996.000
	, ,	dan Minuman Tamu	Raya					
		Yang disediakan						
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordina	si Jumlah Laporan rapat	Kab.Murung	12 Bulan	249.392.000	APBD	12 Bulan	303.832.700
	dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan konsultasi	Raya					
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daera	h Jumlah Jenis	Kab.Murung			APBD	1 Paket	63.780.000
	Penunjang Urusan Pemerintaha	n Pengadaan Barang	Raya					
	Daerah	Milik Daerah						
		Penunjang Urusan						
		Pemerintahan Daerah						
		yang disediakan						
2.12.01.2.07.09	Pengadaan	Jumlah Pengadaan	Jumlah	Kab.Murung		APBD	1 Paket	63.780.000
	Gedung	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Pengadaan	Raya				
	Kantor	disediakan	Gedung					
	atau		Kantor atau					
	Bangunan		Bangunan					
	Lainnya		Lainnya yang					
			disediakan					
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusa	· ·			1.522.052.510			1.455.408.393
	Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan						
		Pemerintahan Daerah						
		yang disediakan						
2.12.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah arsip dan surat menyurat yang disediakan	Kab.Murung			APBD	12 Bulan	8.500.000
		monyatat jung disediakan	Raya					
2.12.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunika:		Kab.Murung	12 Bulan	126.225.718	APBD	12 Bulan	53.898.000
	Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber	Raya					



		Daya Air dan Listrik yang disediakan						
2.12.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab.Murung Raya	12 Bulan	46.320.000	APBD	12 Bulan	23.950.000
2.12.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran yang disediakan	Kab.Murung Raya	1 Tahun	1.343.980.792	APBD	1 Tahun	1.369.060.392
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			93.369.640			81.840.000
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab.Murung Raya	12 Bulan	85.390.000	APBD	12 Bulan	81.840.000
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharan/Rehabilitasi gedung kantor yang disediakan	Kab.Murung Raya	12 Bulan	7.979.640	APBD		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah Jenis Program Pendaftaran Penduduk yang disediakan			218.203.300			209.867.830
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang disediakan			78.280.000			96.569.205



2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Jumlah Jenis Peningkatan	Kab.Murung	10	78.280.000	APBD	10	
	Penduduk	Pelayanan Pendaftaran	Raya	Kecamatan			Kecamatan	96.569.205
		Penduduk yang						
		disediakan						
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis			43.200.000			20.000.000
		Pendaftaran Penduduk						
		yang disediakan						
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan,	Jumlah Jenis Penyusunan	Kab.Murung	12 Bulan	23.200.000	APBD		
	Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,	Tata Cara Perencanaan,	Raya					
	Pengendalian, dan Pelaporan	Pelaksanaan,						
	Penyelenggaraan Adminduk Terkait	Pemantauan, Evaluasi,						
	Pendaftaran Penduduk	Pengendalian, dan						
		Pelaporan						
		Penyelenggaraan						
		Adminduk Terkait						
		Pendaftaran Penduduk						
		yang disediakan						
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen	Jumlah Jenis Pengadaan	Kab.Murung	5000	20.000.000	APBD	4000	20.000.000
	Kependudukan Selain Blangko	Dokumen Kependudukan	Raya	Keping			Keping	
	KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait	Selain Blangko KTP-EL,						
	Pendaftaran Penduduk Sesuai	Formulir dan Buku						
	Dengan Kebutuhan	Terkait Pendaftaran						
		Penduduk Sesuai Dengan						
		Kebutuhan yang						
		disediakan						
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran	Jumlah Jenis			72.505.800			73.380.500
	Penduduk	Penyelenggaraan						
		Pendaftaran Penduduk						
		Yang disediakan						
2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga	Jumlah Jenis dan Laporan	Kab.Murung	12 Bulan	62.514.000	APBD	12 Bulan	57.597.000
	Pemerintah Dan Lembaga Non	Koordinasi Antar	Raya					
	Pemerintah di Kabupaten / Kota	Lembaga Pemerintah Dan						



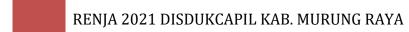
	Dalam Penertiban Pelayanan	Lembaga Non Pemerintah						
	Pendaftaran Penduduk	di Kabupaten / Kota						
	1 0/1011 (11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/	Dalam Penertiban						
		Pelayanan Pendaftaran						
		Penduduk yang						
		disediakan						
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Fasilitasi	Kab.Murung	12 Bulan	9.991.000	APBD	12 Bulan	15.783.500
2.12.02.2.03.03	r asintasi r chdartaran r chdddik	Pendaftaran Penduduk	Raya	12 Dulan	7.771.000	AIBD	12 Bulan	13.763.300
		yang Disediakan	Kaya					
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Jenis			24.217.500			19.918.125
2.12.02.2.04	Penyelenggaraan Pendaftaran	Pembinaan dan			24.217.300			19.910.123
	Penduduk	Pengawasan						
	1 chuuuk	Penyelenggaraan						
		Pendaftaran Penduduk						
		yang Disediakan						
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait	Jumlah Jenis Bimbingan	Kab.Murung	12 Bulan	24.217.500	APBD	12 Bulan	19.918.125
2.12.02.2.04.03	Pendaftaran Penduduk	Teknis Terkait	Raya	12 Dulan	24.217.300	AIBD	12 Bulan	17.716.123
	1 chdararan 1 chdadax	Pendaftaran Penduduk	Raya					
		yang disediakan						
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Jenis Program			145.787.300			189.860.018
2.12.03	TROGRAM TENCATATAN SILL	Pencatatan Sipil yang			143.767.300			102.000.010
		disediakan						
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Pelayanan			49.360.000			96.109.268
2.12.03.2.01	Felayanan Fencatatan Sipii	Pencatatan Sipil yang			49.300.000			90.109.208
		disediakan						
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan	Jumlah Jenis Pencatatan,	Kab.Murung	10	49.360.000	APBD	10	92.659.268
2.12.03.2.01.01	Penerbitan Dokumen Atas	Penatausahaan dan	Raya	Kecamatan	49.300.000	AFBD	Kecamatan	92.039.208
	Pelaporan Peristiwa Penting	Penerbitan Dokumen	Kaya	Kecamatan			Recamatan	
	reiaporan rensuwa renung	Atas Pelaporan Peristiwa						
		_						
2.12.02.2.01.04	D	Penting yang disediakan	TZ 1 M			ADDD	12 D. 1	2.450.000
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tatacara Perencanaan,	Jumlah Jenis Penyusunan	Kab.Murung			APBD	12 Bulan	3.450.000
	Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,	Tatacara Perencanaan,	Raya					



	Pengendalian dan Pelaporan	Pelaksanaan,						
	Penyelenggaraan Adminduk Terkait	Pemantauan, Evaluasi,						
	Pencatatan Sipil	Pengendalian dan						
		Pelaporan						
		Penyelenggaraan						
		Adminduk Terkait						
		Pencatatan Sipil yang						
		disediakan						
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis			72.505.800			75.880.500
		Penyelenggaraan						
		Pencatatan Sipil Yang						
		Disediakan						
2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga	Jumlah Jenis dan Laporan	Kab.Murung	12 Bulan	62.514.000	APBD	12 Bulan	57.597.000
	Pemerintah Dan Lembaga Non	Koordinasi Antar	Raya					
	Pemerintah di Kabupaten / Kota	Lembaga Pemerintah Dan						
	Dalam Penertiban Pelayanan	Lembaga Non Pemerintah						
	Pencatatan Sipil	di Kabupaten / Kota						
		Dalam Penertiban						
		Pelayanan Pendaftaran						
		Penduduk yang						
		disediakan						
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Fasilitasi	Kab.Murung	12 Bulan	9.991.800	APBD	12 Bulan	18.283.500
		Terkait Pencatatan Sipil	Raya					
		yang Disediakan						
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Jenis			23.921.500			17.870.250
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan						
		Pengawasan						
		Penyelenggaraan						
		Pencatatan Sipil yang						
		Disediakan						
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait	Jumlah Jenis Bimbingan	Kab.Murung	12 Bulan	23.921.500	APBD	12 Bulan	17.870.250
	Pencatatan Sipil	Teknis Terkait Pencatatan	Raya					

		Sipil Yang Disediakan						
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Jumlah Jenis			577.090.692			615.185.551
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengelolaan Informasi						
		Administrasi						
		Kependudukan yang						
		Disediakan						
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan	Jumlah Jenis			56.071.650			64.500.000
	dan Pemanfaatan dan Penyajian	Pengumpulan Data						
	Database Kependudukan	Kependudukan dan						
		Pemanfaatan dan						
		Penyajian Database						
		Kependudukan yang						
		disediakan						
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data	Jumlah Jenis Kerjasama	Kab.Murung	10	56.071.650	APBD	10	64.500.000
	Kependudukan	Pemanfaatan Data	Raya	Kecamatan			Kecamatan	
		Kependudukan Yang						
		Disediakan						
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi	Jumlah Jenis			24.840.000			16.798.426
	Kependudukan	Pengelolaan Informasi						
		Kependudukan						
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tatacara Perencanaan,	Jumlah Jenis Penyusunan	Kab.Murung	12 Bulan	24.840.000	APBD	12 Bulan	16.798.426
	Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,	Tatacara Perencanaan,	Raya					
	Pengendalian dan Pelaporan	Pelaksanaan,						
	Penyelenggaraan Adminduk Terkait	Pemantauan, Evaluasi,						
	Pengelolaan Informasi Administrasi	Pengendalian dan						
	Kependudukan	Pelaporan						
		Penyelenggaraan						
		Adminduk Terkait						
		Pengelolaan Informasi						
		Administrasi						
		Kependudukan Yang						
		Disediakan						

2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan	Jumlah Jenis			471.994.042			513.969.000
	Informasi Administrasi	Penyelenggaraan						
	Kependudukan	Pengelolaan Informasi						
		Administrasi						
		Kependudukan Yang						
		Disediakan						
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga	Jumlah Jenis dan Laporan	Kab.Murung	12 Bulan	62.514.000	APBD	12 Bulan	64.494.000
	Pemerintah Dan Lembaga Non	Koordinasi Antar	Raya					
	Pemerintah di Kabupaten / Kota	Lembaga Pemerintah Dan						
	Dalam Penertiban Pengelolaan	Lembaga Non Pemerintah						
	Informasi Administrasi	di Kabupaten / Kota						
	Kependudukan	Dalam Penertiban						
		Pelayanan Pendaftaran						
		Penduduk yang						
		disediakan						
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan	Jumlah Jenis Fasilitasi	Kab.Murung	12 Bulan	409.480.042	APBD	12 Bulan	449.475.000
	Informasi Administrasi	Terkait Pengelolaan	Raya					
	Kependudukan	Informasi Administrasi						
		Kependudukan Yang						
		Disediakan						
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Jenis			24.185.000			19.918.125
	Pengelolaan Informasi Administrasi	Pembinaan dan						
	Kependudukan	Pengawasan						
		Pengelolaan Informasi						
		Administrasi						
		Kependudukan Yang						
		Disediakan						
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Pengelolaan	Jumlah Jenis Bimbingan	Kab.Murung	12 Bulan	24.185.000	APBD	12 Bulan	19.918.125
	Informasi Administrasi	Teknis Pengelolaan	Raya					
	Kependudukan Dan Pendayagunaan	Informasi Administrasi						
	Data Kependudukan	Kependudukan Dan						
		Pendayagunaan Data						



		Kependudukan Yang						
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL	Disediakan  Jumlah Pengelolaan			41.829.000			19.609.526
	KEPENDUDUKAN	Profil Kependudukan Yang Disediakan						
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Penyusunan Profil			41.829.000			19.609.526
		Kependudukan Yang Disediakan						
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan	Jumlah Jenis Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan	Kab.Murung Raya	12 Bulan	41.829.000	APBD	12 Bulan	19.609.526
	Yang Lain	Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain Yang Disediakan						
	JUMLAH TOTAL				5.485.667.056			5.603.127.792



#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun. Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, juga implementasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Renja 2021 disusun sebagai perencanaan operasional tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Murung Raya untuk Tahun 2021.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya maupun di lingkup daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 sangat bergantung pada komitmen penyelenggara sendiri. Untuk itu Rencana Kerja Tahun 2021 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Murung Raya selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya

Puruk Cahu, Maret 2020 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pupaten Murung Raya

RUNG REGITA, SP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650811 198603 2 014



LAMPIRAN I : EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN LALU (TAHUN 2020)
SOPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

Tahun : 2020

SASARAN					KINERJA				
STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	BIAYA (Rp)	TARGET	ALISASI BIAYA	CAPAIAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terpenuhinya Kepemilikan Identitas Penduduk dan Pencatatan Sipil	- Persentase Penduduk Ber KTP	- %	- 100 %	Program Pendaftaran Penduduk	270.000.000	100	267.300.000	- 99 %	Januari – Desember 2020
Bagi Masyarakat	- Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	- %	- 75 %	Program Pendaftaran Penduduk	-	100	-	- 0%	Januari – Desember 2020
	- Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	- %	- 90 %	Program Pencatatan Sipil	150.000.000	100	105.000.000	- 70 %	Januari – Desember 2020
	- Indeks Kepuaan Masyarakat (IKM)	- BAIK	- BAIK	Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	BAIK	BAIK	-	- BAIK	Januari – Desember 2020

LAMPIRAN II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya : 2021 SOPD

Tahun

				KINERJA		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	BIAYA (RP)	WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
Terpenuhinya Kepemilikan Identitas Penduduk dan	- Persentase Penduduk Ber KTP	- %	- 100 %	Program Pendaftaran Penduduk	218.203.300	Januari – Desember 2021
'enduduk dan Pencatatan Sipil Bagi Aasyarakat	- Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	- %	- 90 %	Program Pendaftaran Penduduk	218.203.300	Januari – Desember 2021
	- Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	- %	- 95 %	Program Pencatatan Sipil	145.787.300	Januari – Desember 2021
	- Indeks Kepuaan Masyarakat (IKM)	-	- BAIK	Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	543.995.412	Januari – Desember 2021

LAMPIRAN III : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021

SOPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

Tahun : 2021

#### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) YANG MENGACU PADA RPJMD KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Terpenuhinya Kepemilikan Identitas Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat	Persentase Penduduk Ber KTP     Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	1. % 2. %	1. 100 % 2. 90 %
	Wasyarakat	3. Persentase Penduduk ber Akta Kelahiran (O-18 Tahun)	3. %	3. 95 %
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4. BAIK	4. BAIK

	SASARAN				KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya tata kelola administrasi	Tertibnya efektifitas dan efisiensi pemerintahan	100 %	1. Penunjang Urusan	Administrasi Keuangan     Perangkat Daerah	1. Input ( Dana)	Rp.	2.234.337.120	
urusan Pemerintahan yang baik dan tertib.	Daerah Kabupaten/ Kota		Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	· ·	2. Out Put (keluaran)     Gaji, Tunjangan ASN,dan     Honorarium pengelola     administrasi keuangan dan     barang	Bulan	12	
					Out Come ( Hasil)     tertibnya kegiatan     administrasi Keuangan     Perangkat Daerah	Persen	100 %	
				Admininstrasi kepegawaian perangkat	1. Input ( Dana)	Rp.	0	
				Daerah.	Out Put ( keluaran)     Kegiatan Pendidikan dan     Pelatihan Pegawai ASN.	Bulan	0	
					Out Come ( Hasil)     Terlaksananya Administrasi     Kepegawaian	Persen	0	

	SASARAN				KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Administrasi Umum     Perangkat Daerah	1. Input ( Dana)	Rp.	594.057.489	
					2. Out Put ( Keluaran) Tersedianya Komponen/ Peralatan/ Bahan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	
					3. Out Come ( Hasil) Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Persen	100%	

	SASARAN				KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET)	KETERANGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyediaan Jasa     Penunjang urusan     Pemerintah Daerah	1. Input ( Dana)	Rp.	1.484.687.350	
					2. Out Put ( Keluaran) Tersedianya Administrasi Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, Jasa Peralatan Kantor dan Jasa Pelayanan Umum	Bulan	12	
					Out Come ( Hasil)     Terlaksananya kegiatan administrasi Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	

SASARAN				KEGIATAN			
INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET)	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8	9
			5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1. Input ( Dana)	Rp.	120.344.000	
			Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2. Out Put ( Keluaran) Jasa Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan	Bulan	12	
				3. Out Come ( Hasil) Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen	100%	
	INDIKATOR	INDIKATOR RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	INDIKATOR TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	INDIKATOR  RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)  2 3 4 5  5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan	INDIKATOR  RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)  2 3 4 5 6  5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Penerintahan Daerah Penerintahan Daerah Penerintahan Daerah Penerintahan Daerah Penerintahan Daerah Peneriharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan  3. Out Come (Hasil) Terpeliharanya Barang	INDIKATOR  RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)  2 3 4 5 6 7  5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Penunjang urusan Rendaraan Pajak dan Perjinan Kendaraan Dinas Operasional dan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan 3. Out Come (Hasil) Terpeliharanya Barang	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)   2   3   4   5   6   7   8

	SASARAN				KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya kebutuhan sarana	Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai	100 %	2. Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran     Penduduk	1. Input ( Dana)	Rp.	144.258.000	
dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas	sebagai penunjang pengawasan dan kinerja aparatur.				Out Put (keluaran)     Kegiatan Perjalanan Dinas     Perekaman KTP Elektronik     dan KIA	Bulan	12	
dan peningkatan kinerja aparatur.					Out Come ( Hasil)     Terlaksananya pencapaian target pembuatan dokumen kependudukan     KTP-Elektronik dan KIA	Persen	100 %	
				Penataan Pendaftaran     Penduduk	1. Input ( Dana)	Rp.	37.800.000	
					2. Out Put (keluaran)     Kegiatan Perjalanan Dinas     Pemantauan, Evaluasi dan     Pengendalian Pelaporan     dan Tersedianya Blanko     Kartu Identitas Anak (KIA)	Bulan	12	
					3. Out Come ( Hasil)	Persen	100 %	

Penyelenggaraan	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk 1. Input ( Dana)	Rp	66.120.000	
Pendaftaran Penduduk	Out Put (keluaran)     Koordinasi, Rakornas,     Rakortek, Rakernis     Pendaftaran Penduduk dan     Tersedianya Formulir dan     Buku Pendaftaran     Penduduk	Bulan	12	
	3. Out Come ( Hasil) Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persen	100 %	
4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Input ( Dana)	Rp	9.157.500	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2. Out Put (keluaran) Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	Bulan	12	
	3. Out Come ( Hasil) Terlaksananya Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persen	100 %	

SASARAN							KEGIATAN			
INDIKATO	OR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		PROGRAM	URAL	AN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
2		3		4	5		6	7	8	9
Meningkatkan disiplin aparatur	kualitas	100 %	3.	Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Sipil	Pencatatan	1. Input ( Dana)	Rp	91.410.000	
				·	·		Out Put (keluaran)     Kegiatan Administrasi     Pencatatan Peristiwa     Penting Pencatatan Sipil	Bulan	12	
							Out Come ( Hasil)     Terlaksananya Pelayanan     Pencatatan Sipil	Persen	100%	
	INDIKATO 2	INDIKATOR  2  Meningkatkan kualitas	INDIKATOR  RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)  2 3  Meningkatkan kualitas 100 %	INDIKATOR  RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)  2 3  Meningkatkan kualitas 100 % 3.	INDIKATOR  RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)  2 3 4  Meningkatkan kualitas 100 % 3. Program	INDIKATOR  RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)  PROGRAM  URAI  100 % 3. Program 1. Pelayanan	INDIKATOR  RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)  2 3 4 5  Meningkatkan kualitas 100 % 3. Program 1. Pelayanan Pencatatan	INDIKATOR  RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)  2 3 4 5 6  Meningkatkan kualitas disiplin aparatur  3. Program Pencatatan Sipil  1. Pelayanan Pencatatan Sipil  2. Out Put (keluaran) Kegiatan Administrasi Pencatatan Penting Pencatatan Sipil  3. Out Come (Hasil) Terlaksananya Pelayanan	INDIKATOR	INDIKATOR

	SASARAN				KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyelenggaraan     Pencatatan Sipil	1. Input (Dana)	Rp.	66.120.000	
					2. Output (keluaran) Rapat koordinasi, Rakornas, rakortek, Rakernis Pelayanan Pencatatan Sipil dan tersedianya Blanko/ Formulir Pencatatan Sipil	Bulan	12	
					Out Come (hasil)     Terlaksananya     Penyelenggaraan     Pencatatan Sipil	Persen	100%	
				Pembinaan dan     Pengawasan	1. Input (Dana)	Rp.	6.857.500	
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Output (keluaran)     Kegiatan Bimbingan Teknis     Aparat Pencatatan Sipil	Bulan	12	
					Out Come (hasil)     Terlaksannya Kegiatan     Bimbingan Teknis terkait	Persen	100%	

		Pencaatan Sipil		

SASARAN				KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya kualitas sistem	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem	100 %	4. Pengelolaan Informasi	Pengumpulan Data     Kependudukan dan	1. Input (Dana)	Rp	38.550.000	
administrasi informasi kependudukan	administrasi kependudukan		Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Output (keluaran)     Pembangunan, Updating,     Kerjasama Tahap Awal	Bulan	12	
					3. Outcome (Hasil) Terpenuhinya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persen	100 %	
				Penataan     Pengelolaan Informasi	1. Input ( Dana)	Rp	64.820.000	
				Administrasi Kependudukan	2. Output (keluaran)  Kegiatan Pemantauan,	Bulan	12	

	Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan  3. Outcome (Hasil) Terlaksanya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100%	
Penyelenggaraan     Pengelolaan Informasi	1. Input ( Dana)	Rp	460.134.792	
Administrasi Kependudukan	2. Output (keluaran) Perjalanan dinas Rakernas, Rakornas, Rakortek, PIAK dan Tersedianya Ribbon KTP Elektronik, Pemeliharaan Perangkat SIAK, JAringan SIAK dan Honor Tim SIAK	Bulan	12	
	3. Outcome (Hasil) Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100%	
Pembinaan dan     Pengawasan	1. Input ( Dana)	Rp	3.537.000	
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Output (keluaran)     Kegiatan Bimtek     pengelolaan Informasi     Administrasi     Kependudukan	Bulan	12	

	3. Outcome (Hasi Terlaksananya dan Pengelolaan Administrasi Kependudukai	Pembinaan Pengawasan Informasi	100%	

SASARAN				KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terpenuhinya Penyusunan Data	Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam	100 %	5. Pengelolaan Profil	Penyusunan Profil     Data Perkembangan	1. Input (Dana)	Rp	44.916.000	
Perkembangan Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan	Pengelolaan Data Kependudukan		Kependudukan	dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Output (keluaran)     Penyusunan Buku Profil     dan Buku perkembangan     Kependudukan	Bulan	12	
					Outcome (Hasil)     Terpenuhinya Penyusunan     Profil Data Perkembangan     dan Proyeksi     Kependudukan.	Persen	100 %	

